
BERLOMBA DI DAERAH BERGOLAK: PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL (PON) IV DI KOTA MAKASSAR

Leni Ponne

Pusat Kajian Transformasi Masyarakat

Abstrak

Penyelenggaraan PON I yang dilaksanakan di Solo menjadi satu langkah pemerintah Indonesia untuk menyatukan semua wilayah Republik Indonesia. Penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah PON IV di tahun 1957 bukan hal mudah sebab wilayah ini masih dalam keadaan belum aman. Pemerintah pusat menjadikan Makassar sebagai tuan rumah pelaksana PON IV dengan tujuan untuk menarik perhatian pemuda agar tidak terlibat ke dalam pemberontakan. Perayaan PON IV dilaksanakan di Kota Makassar juga untuk melebur suasana ketegangan di kalangan penduduk. Penyelenggaraan PON IV di Kota Makassar telah diklaim sebagai perayaan olah raga terakbar sepanjang periode tahun 1950an dimana tidak kurang dari delapan belas cabang olahraga dipertandingkan serta sembilan belas daerah ikut serta berlomba. Pada PON IV ini Jakarta Raya tampil sebagai juara umum sedangkan Sulawesi sebagai tuan rumah hanya mampu meraih posisi ke tujuh.

Kata kunci : Pekan Olahraga Nasional, 1957, Makassar, keresahan regional

Abstract

The organizing of the first Indonesian National Game (PON) in Solo was one of the steps taken by the government of the Republic of Indonesia to unify all the regions within the republic. The appointment of Makassar to hold the fourth National Game was not an easy matter due to the still unsettled security issues. The central government used the appointment of Makassar as the host city to distract the youth of the region from joining the rebellion. They also used the event to dissolve some tensions among the population. The fourth National Game in Makassar had been hailed as the biggest sports event in 1950 where no less than 18 sports were competed and nineteen contingents from different regions participated. In this National Game, Jakarta Province came out as the overall winners while Sulawesi as the host only became theseventh overall winners.

Keywords: National Game, 1957, Makassar, regional unrest

PENDAHULUAN: OLAH RAGA DAN POLITIK

Dimana dan kapan saja, olahraga selalu menarik dan memukau sebagian besar manusia. Kendati dalam keadaan krisis, perang, bencana, olahraga tidak hanya dijadikan sebagai penghibur, di lain pihak olahraga juga bisa dijadikan pemersatu dalam sebuah perpecahan. Dari sejak zaman Yunani, olahraga selalu dijadikan sebagai sarana menghibur masyarakat, pertarungan gladiator melawan sesama gladiator dan ataupun melawan hewan buas merupakan bagian dari pertunjukan olahraga untuk menghibur berbagai kalangan masyarakat baik bangsawan maupun golongan masyarakat biasa (Daud, 2007: 17).

Olahraga juga sering dijadikan alat popularitas semua golongan untuk kepentingan ekonomi, meskipun olahraga juga tidak terlepas dari dunia perpolitikan suatu pemerintah atau negara. Pesta olahraga atau kejuaraan selalu disambut dengan meriah oleh semua golongan masyarakat tanpa mengenal status sosial karena siapapun juga bisa ikut memeriahkannya. Dilihat dari pergolakan politik pada masa lalu yang masih serba tidak menentu, dan untuk mencegah perpecahan, pergelaran olahraga selalu dijadikan sebagai alat pemersatu. Perhelatan olahraga yang di selenggarakan pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945, yang akan dibicarakan selanjutnya merupakan bagian proses pembentukan identitas bangsa Indonesia.

Pencarian identitas bangsa Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1950an, adalah masa yang penting untuk kita bicarakan. Jalur politik tidak selamanya dijadikan instrument pemerintah Indonesia sebagai upaya pembentukan identitas kebangsaan. Perhelatan olahraga, seni, gaya hidup adalah salah satu bagian yang penting untuk membentuk karakter bangsa Indonesia. Dalam studinya Bene-

dict Anderson (lebih dikenal dengan Ben Anderson), menjelaskan bahwa pertumbuhan nasionalisme Indonesia pada masa awal kemerdekaan tidak terlepas dari perhelatan olahraga yang dibangun pemerintah Indonesia. Olahraga sebagai penawar benih-benih perpecahan di kalangan masyarakat maupun perpecahan antar daerah dan proses inilah dimana olahraga menjadi bagian penting untuk memahami nasionalisme (Anderson, 2008: 250).

Soekarno sebagai presiden dalam membangun identitas bangsa Indonesia menjadi bangsa yang betul-betul merdeka tanpa adanya intervensi pihak Belanda, tidak hanya melalui jalur politik nasional tetapi juga melalui jalur olahraga. Usaha ini tampak jelas setelah tanggal 19 Agustus 1945, yakni dilakukannya pembentukan kabinet pertama bangsa Indonesia. Usaha pemerintah untuk membangun mental berbagai kalangan masyarakat khususnya generasi muda yakni melalui olahraga sebagaimana yang pernah dilakukan Jepang dalam membangun mental pemuda-pemuda Indonesia sebagai pembantu angkatan perangnya (Husadarta, 2010: 21).

Untuk permasalahan ini, pemerintah menunjuk Kementerian Pendidikan Pengajaran untuk membentuk lembaga yang bertugas merencanakan atau melaksanakan kepengurusan di bidang olahraga. Usaha ini terbilang cukup sukses dalam membangun mental dan fisik pemuda dan kemudian pemerintah Indonesia membentuk GELORA (Gerakan Latihan Rakyat), yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata. Penunjukkan Otto Iskandar Dinata sebagai ketua GELORA tidak terlepas karena perannya dalam pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonésia), dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Pada masa kepemimpinan Otto Iskandar Dinata, GELORA bergabung dengan pusat olahraga versi Jepang yakni

Djawa Iku Kai menjadi PORI (Pesatuan Olahraga Republik Indonesia). *Djawa Iku Kai* merupakan organisasi yang didirikan oleh pemerintah Jepang dengan maksud melatih jasmani dan rohani di antara bangsa *Nippon* dan penduduk tanah Jawa pada umumnya. Situasi politik di Jakarta yang tidak menentu karena gangguan tentara Belanda akhirnya membuat PORI dipindahkan ke Solo di jalan Purwosari (Husadarta, 2010: 22).

Bulan Januari tahun 1947 Presiden Soekarno meresmikan kepengurusan tetap PORI dan dalam waktu bersamaan juga presiden membentuk KORI (Komite Olimpiade Republik Indonesia), Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai ketuanya. KORI yang mempunyai tugas menangani masalah olahraga, tidak lain untuk mempersiapkan atlet-atlet yang akan diikutkan dalam pertandingan olimpiade di London. Rencana ini gagal karena adanya agresi militer dan selain itu pihak panitia di London menolak keikutsertaan Indonesia dalam olimpiade (Brown : 4).

Setelah penolakan atlet Indonesia dalam olimpiade, masalah itu kemudian dibahas dalam konferensi PORI di Solo pada 1 Mei 1948. Pada konferensi itu akhirnya para pengurus PORI sepakat untuk mengadakan PON (Pekan Olahraga Nasional). PON pertama pun terselesaikan pada 9 sampai 12 September 1948. Satu hal yang harus dicatat bahwa PON pertama lahir karena semangat kebangsaan. Pekan olahraga yang direncanakan pemerintah pada masa-masa awal kemerdekaan bukan hanya untuk mengembangkan minat olahraga para pemuda, akan tetapi merupakan salah satu langkah membangun persatuan.

Pelaksanaan PON ini hanya bergulir di seputar kepulauan Jawa, akan tetapi di tahun 1950an Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan PON. Jika kita mencermati kenapa pemerintah pusat di Jakarta menunjuk Makassar seba-

gai tuan rumah PON IV, padahal daerah ini dalam tahun 1950an, adalah daerah yang mengalami pergolakan. Adanya gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan praktis menghambat perpolitikan di Sulawesi Selatan dan akibatnya roda perekonomian baik di Kota Makassar mengalami krisis.

Penunjukkan Makassar sebagai tuan rumah pelaksanaan PON IV seolah-olah di luar dugaan yang sebenarnya mengingat dalam periode ini keadaan wilayah ini belum stabil (Dias Pradadimara 2014). Tindakan pengacau, kriminalitas, perampokan di tahun 1950an di Kota Makassar tidak menjadi penghambat ekspresi dan kegembiraan masyarakat ketika Makassar dijadikan sebagai tuan rumah PON IV. Adanya pelaksanaan PON IV di Kota Makassar memberi angin sejuk kepada masyarakat pada waktu itu, dan jika selama ini masyarakat hidup dalam ketakutan, dengan adanya penyelenggaraan PON IV dapat melebur semua rasa ketakutan dalam ekspresi kegembiraan. Dari kondisi daerah Sulawesi Selatan yang tidak aman menjadi menarik untuk melihat Mengapa kota Makassar ditunjuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan PON IV? dan lebih jauh bagaimana persiapan dalam menyelenggarakan PON IV?.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan ini, penulis memilih batasan temporal yakni periode tahun 1950an dimana dalam periode ini sangatlah penting untuk memahami sejarah Indonesia dan khususnya sejarah di Kota Makassar. Banyak literatur bacaan sejarah di tahun 1950an yang menjelaskan keadaan Kota Makassar dalam periode ini selalu berkaitan dengan gerakan pemberontakan. Oleh karena itu, seolah-olah Kota Makassar dalam periode ini wilayah yang betul-betul penuh pergolakan, sehingga peristiwa sejarah lain tidak begitu nampak. Padahal, jika ditelusuri lebih jeli lagi mengenai periode ta-

hun 1950an di Kota Makassar gerakan pemberontakan tidak begitu mengancam stabilitas politik. Acara nonton bioskop, perlombaan fashion, seni dan pelaksanaan PON IV adalah salah satu bukti untuk mengatakan peristiwa sejarah dalam tahun 1950an di Kota Makassar sangat dinamis.

DARI KOTA MEDAN KE KOTA MAKASSAR

Sejak terlaksananya Pekan Olahraga Nasional I sampai pada penyelenggaraan PON III di kota Medan, pemerintah Indonesia pada tahun 1950an, terus mengobarkan semangat nasionalisme baik melalui pertandingan olahraga, kebudayaan dan pertunjukan seni. Usaha pemerintah ini tidak lain untuk menyatukan semua daerah termasuk Sulawesi Selatan untuk masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Di sisi lain usaha pemerintah untuk menunjukkan kepada setiap daerah bahwa Republik Indonesia sudah sepenuhnya menjadi pemerintah yang berdaulat (Bogaets, 2011: 256). Dalam periode tahun 1950an perumusan identitas Bangsa Indonesia tidak hanya melalui jalur politik akan tetapi berbagai saluran resmi yang digunakan dalam membangkitkan kebudayaan nasional yang baru apakah itu melalui perhelatan olahraga, seni, dan budaya. Usaha pemerintah ini cukup sukses karena berhasil mendapat dukungan dari berbagai kalangan baik dari kalangan intelektual, seniman, masyarakat dan maupun mantan atlet-atlet peserta PON I. Meski dalam periode tahun 1950an terbilang cukup sulit bagi pemerintah Indonesia membangun negara ini karena adanya beberapa gerakan pemberontakan akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi pemerintah sendiri untuk mengembangkan atau merumuskan identitas-identitas baru Bangsa Indonesia (Bogaets, 2011: 257). Media massa adalah tempat yang sangat tepat bagi pemerintah Indonesia untuk menyebarkan berita-berita per-

helatan olahraga, seni, budaya dan yang terpenting di sini adalah bagaimana PON III mulai diumumkan secara samar-samar yang akan diadakan di kota Medan di tahun yang akan datang.

Semangat pemerintah Indonesia dalam periode tahun 1950an bisa dikatakan puncak dari nasionalisme. Gerakan-gerakan kekacauan yang berlangsung dalam periode ini seolah-olah tidak mampu membendung cita-cita pemerintah, terbukti karena dalam periode ini PON III akan diselenggarakan di Kota Medan dan beberapa tahun kemudian juga akan diselenggarakan PON IV di Kota Makassar. Harapan pemerintah Indonesia dalam menyatukan semua daerah masuk ke wilayah Republik Indonesia melalui perhelatan atau pertandingan olahraga terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan ini dari kalangan masyarakat disebabkan suksesnya penyelenggaraan PON I dan PON II yang dilaksanakan pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan PON I dan PON II terus menyita perhatian masyarakat pada waktu itu.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX terus mendorong pengurus PORI merumuskan kembali penyelenggaraan PON III yang akan dilaksanakan di berbagai daerah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX melakukan rapat koordinasi dengan pengurus PORI untuk menetapkan kapan PON III akan dilaksanakan dan siapa yang akan menjadi tuan rumah penyelenggara PON III. Dalam rapat ini hasilnya adalah mendorong pihak PORI untuk melakukan kongres yang ketiga untuk memutuskan kapan tepatnya akan diadakan PON III.

Dalam kongres ini anggota PORI memutuskan bahwa PON III akan diadakan pada tahun 1953 tepatnya di Kota Medan dengan alasan bahwa Stadion Teladan Medan yang baru selesai dibangun dan pemerintah setempat siap menjadi penyelenggara PON III ("Dokumen

Pekan Olahraga Nasional Ke III”, *Bintang Timur*, Senin 22 Februari 1954, hlm. 3; “Komite Pelaksana PON-III dilantik di Medan”, *Mimbar Umum*, Djumat 25 Februari 1953; “Persiapan Pertama Menyambut PON-III”, *Mimbar Umum*, Sabtu 2 Februari 1952, lihat juga Husdarta, *Sejarah Dan Filsafat Olahraga* (Bandung: Alfabet, 2014: 22). Dalam kongres ini juga oleh pihak anggota PORI menetapkan bahwa pergelaran PON tahun-tahun yang datang akan dilaksanakan empat tahun sekali melalui keputusan kongres. Satu hari setelah Medan ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara PON, G. B. Josua ditunjuk sebagai ketua umum penyelenggara PON III di Kota Medan. G.B. Josua dengan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembukaan PON III yang akan dihadiri oleh Presiden Soekarno.

Satu hari sebelum pembukaan PON III dilaksanakan, bendera PON sudah tiba di Kota Medan dan hampir bersamaan tibanya atlet-atlet peserta PON III dari berbagai daerah. Kedatangan atlet-atlet dan bendera PON langsung disambut dengan meriah oleh masyarakat di Kota Medan dan langsung dibawah keliling kota. Kemudian bendera PON langsung diserahkan kepada G.B. Josua selaku ketua umum penyelenggara PON III. Pada tanggal 20 September 1953 (“Djakarta Raya akan Mengirimkan 200 Orang Djago ke PON ke-III”, *Indonesia Raya*, Kamis 22 Djanuari 1953, hlm. 3; Lihat juga “Penglaksanaan PON ke-3 di Medan adalah Suatu Kepertjajaan”, *Pedoman Rakyat*, Djumat 19 Djanuari 1953) di pagi hari bendera PON III dikibarkan di samping bendera merah putih dan pada hari itu juga Presiden secara resmi membuka pergelaran PON III di Kota Medan. Dalam pergelaran PON III ini diikuti beberapa atlet dari berbagai daerah di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta

Raya, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku dan Nusa Tenggara (“Dokumen Pekan Olahraga Nasional Ke III”, *Bintang Timur*, Rabu, 22 Februari 1954, hlm. 3).

Atlet-atlet yang ikut dalam pertandingan PON III di Medan ditampung di sekolah-sekolah dan asrama-asrama. Kontingen-kontingen PON yang diberangkatkan ke satu daerah menuju Medan dengan menggunakan kapal laut. Para atlet ini mereka tempatkan bukan di kelas tetapi di atas palka yang ditutup dengan terpal. PON III yang dilaksanakan Kota Medan tidak kalah meriah dengan pelaksanaan PON sebelumnya. Pergelaran PON III di Medan mempetandingkan beberapa cabang olahraga seperti Anggar, Bola Voly, Polo Air, Angkat Besi, Bulutangkis, Sepak Bola, Atletik, Hoki, Tenis, Balap Sepeda, Menembak, Tenis Meja, Bola Basket, Renang, Bola Keranjang dan terakhir Loncat Indah (“PON Djateng-PSIM Harapan 3-1”, *Pikiran Rakyat*, Senin, 25 September 1953, hlm. 7). Ketika dilangsungkan PON III di kota Medan, para wartawan Medan memboikot dan tidak memberitakan sepele kata pun berita mengenai kegiatan PON III akibatnya masyarakat tidak mengetahui hasil PON selama 3 hari. Bahkan buletin PON III sendiri tidak memberitakan mengenai kegiatan pertandingan PON sedang berlangsung.

Wartawan melakukan pemboikotan terhadap berita penyelenggaraan PON III di Medan karena tersinggung dengan ucapan G.B. Josua dan juga karena merasa diperlakukan secara tidak baik di pintu masuk oleh G. B. Josua yang dikenal dengan sikapnya yang tegas. Atas insiden ini G.B. Josua meminta maaf kepada PWI Medan dan kepada para wartawan Medan yang meliputi PON III. Sesudah itu pemberitaan mengenai PON III ramai lagi di surat-surat kabar Medan (“PON Djakarta-PON Djawa Barat 5-1”, *Indonesia Raya*, Selasa 7 April, 1953, hlm. 3).

Setelah berakhirnya boikot wartawan, berita mengenai PON III di Kota Medan kembali dimuat di koran-koran. Koran-koran yang paling aktif memberitakan PON III diantaranya Koran *Pikiran Rakyat*, *Bintang Timur* dan *Indonesia Raya*. Di dalam Koran *Pikiran Rakyat* misalnya sangat rinci memberitakan hasil pertandingan PON III, sehingga informasi pertandingan yang terlewatkan dapat diketahui oleh masyarakat umum. Misalnya hasil pertandingan Anggar putera, dimana Sulawesi Utara menjadi juara, diikuti Maluku dan Jawa Barat (Untuk lebih jelasnya lihat: *Pikiran Rakyat*, 23 Muharram 1373. Lihat juga, "PON-III Dimulai Oktober 1953", *Mimbar Umum*). Adapun yang menjadi juara umum dalam penyelenggaraan PON III yakni Jawa Barat dengan memperoleh emas 24, Perunggu 12, Perak 14. Kemudian disusul Jakarta Raya sedangkan Sulawesi Selatan berada diperingkat keenam dengan perolehan 2 emas, 8 Perak, dan 1 perunggu.

Dalam penutupan PON III yang dihadiri oleh Presiden Soekarno meminta pihak panitia dan wartawan untuk saling mendukung agar pergelaran PON berikutnya tidak lagi terjadi insiden memalukan menurut Presiden Soekarno. Dalam penutupan ini juga G. B. Josua mengumumkan bahwa yang menjadi juara umum yakni Djawa barat.

PENUNJUKKAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI TUAN RUMAH PON IV

Sebelum kongres dilakukan oleh anggota PORI di Solo sudah ada kabar sebelumnya bahwa Kota Makassar akan ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON IV ("Dokumen Pekan Olahraga Nasional Ke III", *Bintang Timur*, Senin 22 Februari 1954, hlm. 3). Berita ini yang belum begitu jelas ini sudah sampai ke pemerintah Kota Makassar dan bahkan kabar ini sudah tersebar di kalangan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar dengan senang hati akan menjadi tuan

rumah penyelenggara PON IV.

Empat tahun setelah penyelenggaraan PON III di kota Medan, anggota PORI kembali mengadakan kongres keempatnya untuk merumuskan kembali penyelenggaraan PON IV (Penyelenggaraan PON IV di Kota Makassar bermuatan politis yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah Kota Makassar yang tujuannya untuk menarik perhatian pemuda agar tidak terlibat dalam gerakan pemberontakan, lihat: Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1989)). Kongres yang diselenggarakan di Solo ini berjalan alot karena diwarnai perdebatan sesama anggota PORI sendiri. Sebagian dari anggota PORI yang ikut dalam kongres ini tidak menyetujui kalau Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV, dengan alasan bahwa daerah ini belum aman dari gerakan pemberontakan sehingga dapat mengganggu jalannya penyelenggara PON IV. Sedangkan anggota PORI lainnya bersikeras bahwa PON IV harusnya diselenggarakan di Kota Makassar dengan alasan bahwa penyelenggaraan PON beberapa tahun sebelumnya mengandung unsur-unsur politik untuk menyatukan semua daerah masuk ke wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu sangat tepat jika PON IV dapat diselenggarakan di Kota Makassar dengan tujuan dapat menarik perhatian dan mencegah agar tidak banyak lagi masyarakat terlibat dalam gerakan pemberontakan.

Akhirnya kongres PORI yang dilaksanakan di Solo harus ditunda beberapa hari karena belum bisa diputuskan apakah di Kota Makassar atau di kota lain untuk diselenggarakan PON IV. Pemerintah Kota Makassar sebelumnya sudah mengetahui bahwa Makassar sudah diancang-ancang menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV. Kesempatan ini tidak disia-

siakan oleh pemerintah Kota Makassar. Sebelum diputuskan kota mana yang akan menjadi penyelenggara PON IV, pemerintah Kota Makassar dengan segera mengutus Andi Mattalatta ke Jakarta untuk menemui Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan alasan bahwa Andi Mattalatta sudah di kenal di Jakarta (Harvey, 1989: 103). Penunjukkan Andi Mattalatta menemui Sri Sultan dengan tujuan untuk meminta dukungan agar Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV (Manuskrip Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan, Foto Koleski Pribadi Andi Mattalatta yang didapatkan di gedung Mulo di Kota Makassar).

Sehari sesudah pertemuan Andi Mattalatta dengan Sri Sultan, kongres kembali dilaksanakan di Solo. Atas dukungan Sri Sultan di dalam kongres PORI di Solo memutuskan Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV. Setelah diputuskan bahwa Makassar yang akan menjadi penyelenggara PON IV, Andi Mattalatta kembali ke Makassar untuk menemui Gubernur Soediro. Dalam pertemuan ini Gubernur Soediro dengan segera mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua warga Sulawesi Selatan agar mendukung Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", no reg.,342).

Penunjukkan Kota Makassar menjadi tuan rumah penyelenggara PON IV disambut dengan gembira oleh semua warga dan hal ini dianggap sebagai hal yang sangat membanggakan untuk masyarakat Sulawesi Selatan karena di masa-masa ini hampir setiap daerah berharap dapat menjadi penyelenggara PON. Di sisi lain, penunjukkan Kota Makassar menjadi penyelenggara PON IV ternyata juga menjadi beban untuk pemerintah

karena salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah membangun stadion. Selain pembangunan stadion pemerintah Kota Makassar juga harus menyiapkan asrama-asrama yang layak untuk tempat tinggal para atlit dari luar kota (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", no reg.,342).

Pembangunan asrama-asrama atlit khusus dari luar kota sangatlah penting agar atlit mendapat tempat menginap sementara selama PON diselenggarakan dan tidak seperti sewaktu penyelenggaraan PON III di kota Medan sebagian besar atlit khususnya dari luar daerah harus di tempatkan di sekolah-sekolah. Tentu kejadian seperti itu tidak di harapkan terulang lagi sehingga pemerintah Kota Makassar betul-betul harus mempersiapkan diri dalam penyelenggaraan PON IV sebaik mungkin.

Pembangunan stadion dan asrama para atlit serta sarana olahraga lainnya cukup berat bagi pemerintah Kota Makassar karena untuk mewujudkan semua ini perlu dana yang besar, apalagi pada periode 1950an pemerintah Kota Makassar mengalami krisis ekonomi yang disebabkan gerakan pemberontakan Kahar yang belum berakhir, sehingga praktis industri-industri di Kota Makassar tidak berjalan (McTaggart, 1976: 76). Di pihak lain pemerintah Kota Makassar tidak mau menyalakan kesempatan ini, karena adanya penyelenggaraan PON IV setidaknya menarik atau mencegah para pemuda terlibat dalam gerakan pemberontakan (Harvey, 1989: 103). Adanya tanggung jawab besar sebagai penyelenggara PON IV membuat Gubernur Soediro mengadakan pertemuan dengan Djawatan Sipil di kantor Gubernur untuk membahas penggalangan dana pembangunan stadion.

Salah satu jalan yang dihasilkan di

dalam pertemuan ini adalah bahwa pemerintah Kota Makassar harus meminjam dana kepada pemerintah pusat. Selain itu, Gubernur Soediro juga mengeluarkan surat edaran yang kedua kalinya, tujuan dari surat edaran ini menghimbau setiap kepala daerah dan walikota yang berada di Propinsi Sulawesi Selatan diharuskan setiap instansi pegawai negeri diwajibkan menyisihkan gajinya untuk disumbangkan dalam pembangunan stadion dan sarana olahraga sebagai persiapan menyambut PON IV.

Melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh gubernur di akhir bulan Agustus 1955, pemerintah Kota Makassar berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp.7.650.000. Awalnya dana tersebut sudah dianggap cukup dalam membangun stadion serta fasilitas olahraga lainnya, akan tetapi setelah dilakukan perhitungan ternyata dana yang sudah terkumpul belum cukup. Karena selain membangun stadion dan asrama atlet juga beberapa fasilitas olahraga lainnya seperti gedung olahraga, kolam renang, lapangan bola voli, lapangan bulutangkis dan beberapa fasilitas olahraga lainnya (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", No. Reg. 342).

Untuk menanggulangi kekurangan dana ini pemerintah Kota Makassar terpaksa harus bersurat kembali kepada pemerintah pusat untuk meminjam uang dengan alasan agar pembangunan fasilitas olahraga dalam menyambut penyelenggaraan PON IV dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah pusat selanjutnya mengeluarkan dana pinjaman sebesar Rp.14.000.000 untuk pemerintah Kota Makassar (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1950-1960, "Surat-Surat Mengenai Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Kepanduan/Kepemudaan Dan Olahraga", No. Reg

444). Selain beberapa alasan yang sudah dijelaskan di atas, adanya bantuan dana sebesar Rp.14.000.000 mungkin ada kaitannya dengan Gubernur Soediro atau dengan kata lain untuk meningkatkan citra Soediro di mata orang-orang Sulawesi Selatan, karena Soediro sendiri sebagai Gubernur bukan asli orang Sulawesi Selatan (Dalam studi Barbara Sillars Harvey salah satu penyebab munculnya gerakan pemberontakan Kahar Muzakkar tidak lain hampir semua posisi yang penting di Sulawesi Selatan dikuasai pendatang dari luar, misalnya Gubernur Soediro, Gatot Subroto sebagai panglima TT-VII). Banyak orang Sulawesi Selatan pada masa itu merasa cemburu karena posisi-posisi penting dikuasai oleh orang-orang Jawa.

Terlepas dari itu, dana yang terkumpul sudah cukup untuk membangun stadion dan fasilitas olahraga lainnya. Setelah dana cukup, persoalan berikutnya adalah lokasi untuk membangun stadion. Oleh karena itu Gubernur Soediro kembali melaksanakan rapat di kantor gubernur. Hasil dari pertemuan ini pemerintah Kota Makassar sepakat bekas peternakan (Dias Pradadimara, 2004: 185. Perusahaan peternakan ini sudah ada sejak pemerintah Hindia-Belanda, Lokasi peternakan ini berada di Mattoangin yang pada saat itu Boerderij dan Melk Frisia yang selalu menyediakan susu segar.) di masa Pemerintah Belanda dijadikan lokasi pembangunan stadion.

Penetapan pembangunan stadion di daerah Mattoangin juga menimbulkan polemik antara warga sekitar lahan yang akan dibangun stadion dengan pemerintah Kota Makassar. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan stadion nantinya menolak karena mereka akan tergusur jika stadion sudah dibangun. Pemerintah yang melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan stadion langsung dihadang oleh warga. Dalam suasana seperti ini pemerintah terus melakukan negosiasi dengan warga untuk mencari jalan keluar

dalam menghadapi permasalahan ini.

Ketegangan antara pemerintah dengan warga dapat teratasi setelah pemerintah siap melakukan ganti rugi bagi rumah warga yang terkena lokasi pembangunan stadion dan fasilitas olahraga lainnya. Rumah-rumah warga yang terkena relokasi pembangunan stadion mulai digusur. Anehnya bahwa uang ganti rugi untuk rumah warga yang digusur yang tidak diketahui jumlahnya dan bahkan dalam manuskrip koleksi pribadi Andi Mattalatta juga tidak ada jumlah uang ganti rugi buat warga (Untuk masalah pengusuran rumah warga Andi Mattalatta sendiri yang langsung turun tangan, dengan mengatakan bahwa rumah-rumah penduduk yang terkena relokasi pembangunan stadion akan digantikan uangnya oleh pemerintah, Lihat Manuskrip Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan koleksi Pribadi Andi Mattalatta. Lihat juga Yudhistira Sukantanya dan Goenawan Monoharto (Editor), *Makassar Doloe Makassar Kini Makassar Nanti* (Makassar: Yayasan Losari Makassar, 2000), hlm. 212).

Pada saat permasalahan lokasi pembangunan stadion sudah rampung, Gubernur Soediro kembali melaksanakan rapat yang bertujuan untuk membentuk Dewan Pengawas Jajasan Stadion. Tampaknya dalam pembentukan Dewan Pengawas Jajasan Stadion tidak begitu efektif karena kebanyakan yang menduduki posisi penting dalam Dewan Pengawas ini hampir rata-rata didominasi orang dari luar Sulawesi bagian selatan. Misalnya Raden Soediro, Gatot Soebroto, Meester Jan Carel Juta, Jan Sopaheluwakan dan Kapten Willy Sumanti. Hal yang sama juga terjadi di Dewan Pengurus Jajasan Stadion di antaranya Dokter Soemarno Sosroatmojo, Sompny Adolf Salden, Intje Muhammad Noer Daeng Pabeta dan terakhir Insinjur Raden Pramodji. Dalam posisi seperti ini bisa menimbulkan pertentangan karena tidak satupun di antara orang-orang daerah menduduki posisi

penting dewan maupun dewan pengurus pembangunan stadion. Tentu adanya pertentangan seperti ini akan menghambat pembangunan stadion dan fasilitas olahraga lainnya. Oleh karena itu Gubernur Soediro kembali membentuk Dewan Pengawas Jajasan Stadion dan Dewan Pengurus Jajasan Stadion dengan alasan bahwa dewan pengawas pertama dibentuk hanyalah bersifat sementara.

Adapun susunan Dewan Pengawas yang baru dibentuk oleh Gubernur pasca pembubaran dewan pengawas yang sifatnya sementara diantaranya Lanto Daeng Pasewang ditunjuk menjadi ketua Dewan Pengawas Jajasan Stadion. Adapun anggotanya diantaranya J.F. Warouw, M. Oddang, A.D. Sjahrudin, Sjamsuddin, Mohammad Saleh Daeng Mantinri dan Tion Bie. Sedangkan susunan baru Dewan Pengurus Jajasan Stadion di antaranya J.L. Manusama sebagai ketua dan anggotanya Andi Burhanuddin, Theong Tian Kiem, Mappakaja Daeng Sidjalling, Ahmad Saleh Daeng Tompo Abdul Rahman Daeng Palallo (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", No. Reg. 342).

Tidak lama setelah Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus stadion dibentuk kemudian Lanto Daeng Pasewang sebagai ketua Dewan Pengawas melakukan rapat beserta dengan Dewan Pengurus Stadion di kantor gubernur pada tanggal 21 Desember 1955. Dalam rapat kerja ini diputuskan bahwa Dewan Pengawas mempunyai tugas untuk mengawasi selama pembangunan stadion sedang berlangsung, sedang dewan pengurus mempunyai tugas mengurus pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan selama pembangunan stadion.

Dalam rapat ini, tidak hanya membicarakan pembagian tugas saja, tetapi yang cukup penting dibahas adalah pera-

turan pembangunan stadion. Setidaknya ada limabelas pasal yang dihasilkan di dalam rapat antara Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus Stadion. Misalnya di dalam pasal empat dikatakan bahwa pekerjaan stadion yang dimulai pada tanggal 14 Januari 1956 dan harus selesai pada tanggal 30 Desember 1956, bahkan dalam pasal ini dengan tegas dikatakan bahwa apabila orang atau “pemborong” yang dipekerjakan dalam pembangunan stadion ini tidak mampu menyelesaikan tugasnya tepat waktu maka pihak pekerja dikenakan denda sebesar Rp.100/ hari.

Oleh karena itu dengan adanya ketentuan ini pihak Dewan Pengurus Stadion mulai mencari pihak perusahaan yang mau bekerja sama dalam menyediakan bahan-bahan guna membangun stadion. Andi Baharuddin yang pada saat itu menjabat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Stadion melakukan kerja sama dengan perusahaan kontruksi dan galangan kapal Tello yang dipimpin oleh A.M. Joesoef. Melalui kerjasama ini pihak Joesoef menawarkan bahan-bahan bangunan cukup murah. Akhirnya setelah dikeluarkan surat dengan nomor surat 20 A/K/1956 (Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, “Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya”, No. Reg. 342), dari perusahaan galangan kapal Tello yang dipimpin Joesoef yang ditujukan kepada ketua Dewan Pengurus Stadion menjadi tanda kedua belah pihak bersedia bekerja sama. Di dalam surat ini juga dilampirkan harga bahan-bahan yang diperlukan.

Pembangunan stadion Mattoangin serta fasilitas olahraga lainnya untuk penyelenggaraan PON IV di Kota Makassar diklaim sebagai stadion terbesar yang ada di Indonesia Timur. Sebagaimana yang diberitakan di dalam harian *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta (“PON-IV di Makassar dibuka Presiden”, *Kedaulatan*

Rakyat, Kamis, 24 Oktober 1957, hlm. 2). Stadion Mattoangin kurang lebih dapat menampung penonton sebanyak 2000 orang. Stadion ini dibangun tidak hanya dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas olahraga saja akan tetapi di dalam stadion tersebut juga dilengkapi ruang pertunjukkan sandi-wara dan pertunjukkan film.

Dalam keterangan Drs. Suhardjo Surjobroto yang pada saat itu menjabat sebagai ketua panitia teknik menjelaskan bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menyambut PON IV di Kota Makassar sangatlah memuaskan karena hampir semua kalangan masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyambut penyelenggaraan PON IV (“PON-IV di Makassar dibuka Presiden”, *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 24 Oktober 1957, hlm. 2). Pembangunan stadion dan fasilitas olahraga lainnya berjalan dengan baik karena pada saat itu selama tujuh bulan hujan tidak pernah turun di Kota Makassar sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Pada saat yang sama Drs. Suhardjo Surjobroto juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas olahraga dalam menyambut PON IV di Kota Makassar juga mengalami kendala teknis, karena untuk lapangan Hockey dianggap tidak memuaskan sehingga untuk olahraga ini terpaksa dibuat ulang lapangannya. Peresmian Stadion Mattoangin dan fasilitas olahraga lainnya diawali dengan upacara adat Makassar yang dilaksanakan pada Minggu pagi.

Orang-orang ikut hadir dalam peresmian gedung olahraga ini diantaranya Panglima KDMSSST dan Gubernur militer serta beberapa tokoh-tokoh di antaranya Sjamsuddin, Andi Mattalatta, Sampara Daeng Lili, Manusama, Walikota Junus Daeng Lili dan terakhir Gubernur militer SST Kolonel Andi Pangerang Daeng Rani dan beberapa pejabat daerah di Sulawesi Selatan. Istri Andi Pangerang Daeng Rani sendiri yang menggunting pita di depan pintu masuk

stadion (“PON-IV di Makassar dibuka Presiden”, *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 24 Oktober 1957, hlm. 3).

KESIMPULAN

Walaupun masih banyak wilayah yang secara *de jure* belum diakui bagian dari Republik Indonesia, di tahun 1948 kerja sama antara anggota PORI dan KORI yang ada di Solo berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional I. Tujuan PON I merupakan langkah baru pemerintah Indonesia untuk membuktikan dirinya kepada negara-negara di dunia khususnya di London bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat sepenuhnya. Perayaan PON I yang diselenggarakan di Solo dalam tingkat propinsi, kota maupun karesidenan yang menjadi juara umum pada saat itu Surakarta dengan raihan total 36 medali. PON I yang diselenggarakan di Solo oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai *Hari Nasional Olahraga Indonesia*.

Suksesnya penyelenggaraan PON I yang dilaksanakan di Solo menjadi satu langkah pemerintah Indonesia untuk menyatukan semua wilayah yang belum menyatu dengan wilayah Republik Indonesia. PON juga menjadi alat politik bagi pemerintah untuk mengobarkan semangat nasionalisme di berbagai daerah termasuk nanti di Kota Makassar. Dalam tahun 1951 PON II kembali diselenggarakan di Jakarta yang pada saat itu medali yang diperebutkan sebanyak 203 medali. Dalam penyelenggaraan PON II Jawa Barat tampil sebagai juara umum dengan meraih medali sebanyak 50.

Terus di tahun 1953 PON III diselenggarakan di Kota Medan. Dalam penyelenggaraan PON III cabang olahraga yang dipertandingkan sebanyak 10 cabang dan memperebutkan medali sekira 215 medali. Gelar juara umum kembali diraih oleh provinsi Jawa Barat dengan total medali sekira 50 medali. Penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah PON

IV di tahun 1957 bukan hal mudah bagi anggota PORI sebab wilayah ini masih dalam keadaan belum aman.

Tujuan dibentuk PORI dan maupun KORI bukan hanya untuk mengurus masalah olahraga saja akan tetapi juga menjadi jalur politik pemerintah Indonesia untuk menyatukan semua wilayah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah pusat menjadikan Makassar sebagai tuan rumah pelaksana PON IV dengan tujuan untuk menarik perhatian pemuda agar tidak terlibat ke dalam pemberontakan.

Perayaan PON IV dilaksanakan di Kota Makassar telah melebur suasana ketegangan dikalangan penduduk. Penyelenggaraan PON IV di Kota Makassar telah diklaim sebagai perayaan PON IV terakbar sepanjang periode tahun 1950an, kurang lebih delapan belas jenis olahraga dipertandingan serta sembilan belas daerah ikut serta berlomba memperebutkan 255 medali. Pada PON IV ini Jakarta Raya tampil sebagai juara umum dengan meraih 55 medali sedangkan Kota Makassar sebagai tuan rumah hanya mampu meraih posisi ke tujuh dengan total medali yang diperoleh kurang lebih 17 medali.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Bantaeng 1866-1973, “Surat menyurat Kepala Daerah Bonthain mengenai masalah yang berhubungan dengan keolahragaan di daerah Bonthain, antara lain: kegiatan organisasi olahraga”, No. Reg. 457.

Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, “Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya”, No Reg.,342.

- Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", No. Reg. 342.
- Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1926-1988, "Surat-Surat Tanggal 1 April Tahun 1952-1959, Tentang Berkas Pembangunan Stadion Mattoangin Dan Lampirannya", No. Reg. 342.
- Arsip Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang 1950-1960, "Surat-Surat Mengenai Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Kepanduan/ Kepemudaan Dan Olahraga", No. Reg 444.
- Arsip Pemerintah Soppeng 1908-1959, "An. Kepala Pemerintah Negeri Soppeng: Surat-Surat Tahun 1957 Tentang Pembentukan Panitia Pekan Olah Raga Nasional (PON IV Untuk Daerah Soppeng Dan Permintaan Bantuan Dana Beserta Lampirannya)", No. Reg. 2139.
- Arsip Tana Toraja 1901-1959 (Volume VII, Nomor I tahun 1991/1992), "Surat menyurat KPN/ Kepala Daerah Tana Toraja Yang Berhubungan Dengan Masalah Pekan Olah Raga Nasional ke II dan Ke IV", No. Reg. 1567.
- Februari 1954.
- "Komite Pelaksana PON-III dilantik di Medan". *Mimbar Umum*, Djumat 25 Februari 1953.
- "Penglaksanaan PON ke-3 di Medan adalah Suatu Kepertjajaan". *Pedoman Rakyat*, Djumat 19 Djanuari 1953.
- "Persiapan Pertama Menyambut PON-III". *Mimbar Umum*, Sabtu 2 Februari 1952.
- "PON Djakarta-PON Djawa Barat 5-1". *Indonesia Raya*, Selasa 7 April, 1953.
- "PON Djateng-PSIM Harapan 3-1". *Pikiran Rakyat*, Senin, 25 September 1953.
- "PON-III Dimulai Oktober 1953". *Mimbar Umum*.
- "PON-IV di Makassar dibuka Presiden". *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 24 Oktober 1957.
- "PON-IV di Makassar dibuka Presiden". *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 24 Oktober 1957.

Buku dan Artikel

Surat Kabar

- "Djakarta Raya akan Mengirimkan 200 Orang Djago ke PON ke-III". *Indonesia Raya*, Kamis 22 Djanuari 1953.
- "Dokumen Pekan Olahraga Nasional Ke III". *Bintang Timur*, Rabu, 22 Februari 1954.
- "Dokumen Pekan Olahraga Nasional Ke III". *Bintang Timur*, Senin 22
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist Press.
- Bogaerts, Els. 2011. "Kemana Arah Kebudayaan Kita. Menggagas Kembali Kebudayaan Di Indonesia Pada Masa Dekolonisasi", dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (Penyunting). *Ahli Waris Budaya Dunia Menjadi Indonesia 1950-1965*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Brown, Colin. 2006. "The Indonesian National Games of 1951 and 1953: Identity, Ethnicity and Gender", dalam Adrian Vickers dan Margaret Hanlon (ed), 16th Biennial Conference of the Asian

- Studies Association of Australia, 26 - 29 June 2006. Wollongong: Asian Studies Association of Australia (ASAA) & Research School of Pacific and Asian Studies (RSPAS), The Australian National University.
- Dias Pradadimara. 2004. "Dari Makassar ke Makassar Proses Etnisasi Sebuah Kota", dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R.Effendy (Penyunting). *Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak.
- _____. 2014. "Kronika Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an", dalam Dias Pradadimara, M. Bahar Akkase Teng, Heri Kusuma Tarupay (Penyunting), *Negara dan Masyarakat Sulawesi Selatan di Tahun 1950-an*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Barbara Sillars Harvey. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- J.S. Husdarta. 2010. *Sejarah Dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabet.
- McTaggart, W. Donald. 1976. *Kebijakan Pembangunan Kota Di Indonesia Kasus Ujung Pandang, Sulawesi Selatan*. Arizona: Arizona State University.
- Muhammad Darmawan Daud. 2007. *Menelusuri Jejak-Jejak Sejarah Kuno Sepak Bola Dunia*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- Yudhistira Sukantanya dan Goenawan Monoharto (Editor). 2000. *Makassar Doeloe Makassar Kini Makassar Nanti*. Makassar: Yayasan Losari Makassar.